



## Pemaknaan Artefak Budaya dan Tuturan Perayaan Keagamaan

### *The Interpretations of Cultural Artifacts in Religious Celebration Speeches*

Turnomo Rahardjo<sup>1\*</sup>, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani<sup>2</sup>, dan Lintang Ratri Rahmiaji<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, email: turnomorahardjo@gmail.com

<sup>2</sup> Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, email: hapsarisulistyani@yahoo.com

<sup>3</sup> Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, email: lintangratri84@gmail.com, 081298090999

\* Penulis Korespondensi

#### Article Info

##### Article History

Received

24 Aug 2022

Revised

25 Oct 2022

Accepted

26 Oct 2022

##### Keywords:

cultural artefacts, faith-based organizations, religion.

##### Kata kunci:

agama, artefak budaya, organisasi kemasyarakatan

**Abstract:** This study was intended to comprehend how faith-based community groups communicated about cultural artifacts such as diverse Christmas celebration speeches. This study employed a phenomenological approach in order to understand the importance of identity expressions from the cultural artifacts associated with the Christmas season. This study found that faith-based community organizations interpret the issues of Christmas speeches or greetings differently. Muhammadiyah "frees" its adherents to wish Christians a Merry Christmas or not. Additionally, since Christmas characteristics were seen as examples of cultural inventiveness, it did not raise any objections to them. Congratulating the religious holidays of other religions, such as "Merry Christmas," are officially not prohibited by Nahdlatul Ulama. Similar circumstances apply to the Indonesian Chinese Islamic Association. With so many different religions practiced in Chinese society, sending presents and expressing congratulations during religious events is customary. Persatuan Islam and Majelis Mujahidin offered a different viewpoint. Because it goes against their beliefs, they generally resist sending Christmas greetings.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman komunikasi organisasi kemasyarakatan berbasis agama pada artefak budaya yang berupa berbagai bentuk tuturan perayaan Natal. Studi ini menggunakan metode fenomenologi untuk mengetahui pemaknaan mengenai komunikasi identitas dari artefak budaya perayaan Natal. Studi ini menemukan bahwa organisasi kemasyarakatan berbasis agama memaknai secara berbeda isu tentang tuturan perayaan Natal. Muhammadiyah "membebaskan" warganya untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan selamat Natal kepada umat Nasrani. Selain itu, juga tidak mempersoalkan atribut Natal karena atribut tersebut sebatas dipahami sebagai kreativitas budaya. Nahdlatul Ulama (NU) secara kelembagaan membolehkan adanya tuturan selamat pada perayaan agama lain, seperti mengucapkan selamat Natal. Demikian halnya dengan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Dalam masyarakat Tionghoa yang memiliki beragam keyakinan, mengucapkan selamat dan mengirimkan hadiah pada perayaan agama yang berbeda merupakan hal yang wajar dilakukan. Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Mujahidin. Mereka cenderung "menolak" tuturan perayaan Natal karena bertentangan dengan akidah.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan secara budaya merupakan perwujudan masyarakat majemuk. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang terdiri dari 1.340 kelompok sub etnis. Jawa merupakan kelompok etnis terbesar, sekitar 41% dari keseluruhan populasi (BPS 2015). Indonesia juga dikenal sebagai negara multiagama: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Khonghucu, dan juga agama lokal (Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Selain itu, Indonesia masih mempunyai aliran kepercayaan seperti *Sapta Dharma* dan *Kawruh Jiwa* di Jawa Tengah dan Jawa Timur; *Sunda Wiwitan* di Banten dan Jawa Barat; *Parmalim* di Sumatera Utara; dan *Kaharingan* di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Keberagaman elemen budaya seperti agama dan etnis menjadi isu identitas yang penting bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan jika berbagai permasalahan atau konflik berbasis keberagaman identitas budaya terlihat jelas di sepanjang sejarah Indonesia.

Di antara keberagaman sikap masyarakat Indonesia terhadap perayaan agama yang berbeda, Desa Pengilon, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga dapat memberikan warna toleransi yang lebih terang (Faidi, 2020). Masyarakat Desa Pengilon berkomitmen untuk meneruskan nilai toleransi ke generasi muda dengan melibatkan remaja dalam perayaan *Halalbihalal* Bersama dan Natal Bersama. Pelibatan tersebut dimulai dari pra pelaksanaan atau persiapan acara, sesi seremonial, dan yang terakhir adalah pada sesi pembagian hadiah dan bingkisan. Penambahan kata “bersama” dalam *Halalbihalal* Bersama dan Natal Bersama

dimaksudkan sebagai internalisasi nilai agar generasi muda mengingat bahwa perayaan agama manapun dilihat sebagai perayaan bersama dalam lingkup hidup bermasyarakat. Kultur pendidikan toleransi non formal yang dilakukan masyarakat inilah yang menjadikan Kota Salatiga dapat meraih predikat kota paling toleran dari 94 kota di Indonesia versi Riset Indeks Kota Tertoleran Se-Indonesia 2020 yang diinisiasi oleh Setara Institute.

Membicarakan toleransi dalam perspektif agama Islam, salah satunya dapat merujuk pada Alquran. Ada sekitar 40 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa dan membenci, dan lebih dari sepuluh ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa. Ini untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi (Gunawan dan Shobron, 2015). Toleransi yang berasal dari kata “*tasamuh*” dapat dipahami sebagai izin, membolehkan, legitimasi, lisensi, maaf, kelapangan dada, murah hati dan kedermawanan. Hal ini termaktub dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-An’am/6: 108. Surat tersebut menganjurkan untuk bermuamalah atau berinteraksi dengan baik dan tidak boleh berbuat zalim terhadap keluarga dan kerabat meskipun non muslim (Mursyid, 2018). Toleransi beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama orang lain, saling menolong dalam kegiatan kemasyarakatan, menghormati peribadatan agama lain, dan berbuat adil.

Potensi konflik yang mengarah pada munculnya kekerasan sangat mungkin terjadi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Mengapa demikian? Salah satu alasan yang mendasarinya adalah bahwa masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas budaya mereka masing-masing. Lustig & Koester (2010) menjelaskan identitas budaya

sebagai perasaan ikut memiliki dari individu-individu terhadap budaya tertentu. Ting-Toomey & Chung (2017) melihat identitas budaya sebagai perasaan emosional dari seseorang untuk bergabung dalam budaya yang lebih besar. Bagi Klyukanov (Samovar et al., 2010; Samovar et al., 2017), identitas budaya dapat dipandang sebagai keanggotaan kelompok di mana semua orang berbagi makna simbolik yang sama. Dalam catatan Dervin (Samovar et al., 2010; Samovar et al., 2017), identitas budaya adalah apa yang kita konstruksikan ketika kita menjalin kontak dengan orang lain terlepas dari fakta bahwa mereka berasal dari “lingkungan” yang sama atau tidak. Masyarakat yang terbelah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas budaya tersebut kemudian melakukan identifikasi, yaitu menegaskan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi budaya ini pada gilirannya akan menentukan mereka ke dalam *in group* atau *out group*. Perilaku masing-masing individu sebagian ditentukan oleh apakah mereka termasuk ke dalam budaya tertentu atau tidak.

Penelitian ini fokus untuk mengkaji artefak budaya sebagai simbol atau lambang komunikasi yang bisa digunakan untuk menelusuri tindak komunikasi identitas yang dilakukan oleh berbagai kelompok budaya. Dengan kata lain, pemahaman terhadap perbedaan pemakaian pada berbagai artefak budaya merupakan aspek penting bagi pembangunan harmoni sosial dalam masyarakat majemuk. Dalam penelitian ini, artefak budaya mengacu pada berbagai simbol komunikasi yang bisa menunjukkan pemaknaan sosial mengenai keberagaman identitas budaya, seperti tuturan (bahasa), teks, dan tanda-tanda material budaya lainnya. Fokus penelitian ini adalah memahami proses pemaknaan terhadap artefak budaya dalam

komunikasi identitas pada masyarakat majemuk.

Lokus penelitian ini adalah artefak budaya yang terletak pada tuturan ucapan dan interpretasi terhadap berbagai artefak perayaan Natal yang muncul menjelang perayaan Natal. Artefak yang dimaksud dapat berupa teks (tuturan ucapan selamat Natal, lagu-lagu rohani) dan benda yang terkait dengan perayaan Natal (penggunaan atribut Natal, seperti baju sinterklas dan *parcel* Natal). Kontroversi boleh-tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani masih berlanjut hingga saat ini. Setiap tahun menjelang perayaan Natal, pandangan pro dan kontra mengenai ucapan selamat Natal terus bergulir, baik yang disampaikan langsung oleh pemuka agama maupun warganet di media sosial. Sebagian pihak meyakini bahwa umat Muslim yang mengucapkan selamat Natal sebagai sesuatu yang haram karena “bertentangan” dengan akidah. Ucapan selamat Natal diyakini dapat merusak akidah umat Muslim karena Natal merupakan perayaan lahirnya Yesus Kristus. Sebagian pihak yang lain berpandangan bahwa menyampaikan selamat Natal merupakan perwujudan dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama. Perdebatan tidak hanya berhenti pada mengucapkan selamat Natal, tetapi juga masalah atribut Natal seperti baju dan topi Sinterklas. Umat muslim yang kebetulan menggunakan atribut tersebut di tempat-tempat publik menjadi sorotan karena dinilai menjadi bagian dari identitas.

Identitas berfungsi sebagai jembatan antara budaya dengan komunikasi. Identitas memiliki posisi yang penting karena kita mengkomunikasikan identitas kita kepada orang lain, dan kita memahami siapa diri kita melalui komunikasi (Martin & Nakayama, 2018). Dengan kata lain, identitas pada dasarnya dinegosiasikan. Interaksi antara pihak-pihak yang berbeda

identitas sedikit banyak dipengaruhi oleh munculnya etnosentrisme, stereotip, dan prasangka karena masing-masing pihak berusaha memahami identitas mereka sebagai “lebih baik” daripada identitas orang lain. Dalam masyarakat majemuk, permasalahan komunikasi dan negosiasi identitas menjadi proses yang sangat penting untuk mencapai harmoni sosial.

Stella Ting-Toomey melalui teori negosiasi identitas (Littlejohn et al., 2017) mengeksplorasi cara-cara bagaimana identitas dinegosiasikan dalam interaksi dengan pihak lain, khususnya dalam konteks lintas budaya. Ia menegaskan bahwa identitas atau citra diri reflektif diciptakan melalui negosiasi kita ketika kita menegaskan, mengubah atau mempertentangkan identifikasi diri kita atau identifikasi diri orang lain.

Ting-Toomey mengawali penjelasan teoretiknya dengan membedakan antara identitas pribadi dengan identitas budaya. Identitas budaya (agama, ras, etnisitas, dan gender) diasosiasikan dengan keanggotaan dalam budaya partikular atau kelompok sosial, sedangkan identitas pribadi merupakan karakteristik yang lebih unik, yaitu ketertarikan, kemampuan, kecakapan, dan preferensi yang membedakan seseorang dengan orang lain.

Identitas budaya, seperti halnya identitas lainnya, dipelajari melalui interaksi sosial. Identitas budaya berhubungan dengan sebuah kelompok budaya yang lebih besar, yaitu golongan agama, organisasi atau kelompok umur, dan didefinisikan dalam ukuran yang besar berdasarkan jumlah afiliasi yang kita rasakan. Identitas budaya dicirikan oleh dua dimensi, yaitu *value content* dan *salience*. *Value content* terdiri dari jenis evaluasi yang dibuat berdasarkan keyakinan budaya. Misalnya, beberapa budaya memengaruhi anggotanya untuk

menilai komunitas atau kelompok di atas individu. Budaya yang lain lebih memberi hak istimewa kepada nilai-nilai individualistik. *Salience* adalah kekuatan afiliasi yang kita rasakan dengan kelompok partikular dalam situasi yang partikular pula. Seseorang biasanya memiliki ikatan budaya dan/atau etnis yang sangat kuat atau perasaan afiliasinya lemah.

Ting-Toomey secara khusus tertarik pada bagaimana individu-individu mengelola atau menegosiasikan tekanan antara “diri personal” dengan “diri kultural” dalam cara-cara yang bisa meningkatkan rasa hormat kepada kelompok budaya yang lain. *Functional biculturalism* terjadi ketika kita telah mencapai keseimbangan dalam mempertahankan *sense of self* yang kuat. Namun, bisa mempertimbangkan dan memahami identitas orang lain dan memungkinkan untuk memberikan apresiasi terhadap identitas mereka. Di sisi lain, *cultural transformer* terjadi ketika kita dapat berpindah dari satu konteks budaya ke konteks budaya yang lain secara *mindful* dan mudah. Kunci untuk mencapai keadaan tersebut (*functional biculturalism* dan *cultural transformer*) adalah kompetensi antarbudaya.

Menciptakan keseimbangan yang *mindful* pada suatu masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia bukanlah merupakan persoalan yang mudah. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia selalu menjadi wacana penting dalam masyarakat. Seperti diungkapkan Faried F. Saenong (2021), gerakan budaya yang mendominasi wacana Islam Indonesia sejak abad ke-20 merupakan indikator penting pada kajian Islam di Indonesia. Selain itu, aksi dan gerakan signifikan Islam neo-modernis di Indonesia menjadi faktor penting dalam memajukan Islam Indonesia. Gerakan budaya dan agama menjadi pendekatan unik untuk memahami teks-teks Islam, budaya, tradisi, dan praktik-praktik ritual

lokal di Indonesia. Pendekatan tersebut, menurut Saenong, memiliki dua fungsi, yaitu untuk meningkatkan etika sosial dan kesalehan individu, serta pada saat yang sama, untuk bisa menahan diri terhadap penekanan pada perbedaan yang tidak perlu di dunia Muslim. Islam Nusantara merupakan gerakan yang menggunakan pendekatan budaya dan agama. Menurut Hisanori Kato (2021), Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penggagas Islam Nusantara, jelas menekankan keterkaitan antara Islam dan budaya asli Indonesia. Tradisi NU sangat erat terkait dengan ritual keagamaan, seperti tahlilan dan selamatan. Selain pelestarian ritual keagamaan lokal, persatuan Indonesia merupakan pilar ideologis utama dalam gerakan tersebut. Pemimpin NU, Said Aqil Siradj, menyatakan secara tegas bahwa “kita berangkat dari Islam Nusantara dan menjaga keutuhan NKRI, budaya lokal, dan kekayaan alam” (dalam Kato, 2021). Namun, kelangsungan pendekatan agama dan budaya terancam oleh gerakan penyeragaman agama.

Penelitian yang dilakukan Baladas Ghosal (2010) menunjukkan bahwa selama berabad-abad Islam di Asia terkenal karena kemampuannya beradaptasi dengan praktik lokal dan toleransi agama lain. Namun, selama beberapa dekade terakhir, kaum fundamentalis telah mencoba menyeragamkan Islam dan memperkenalkan ketegangan baru. Lebih dari faktor lain apa pun, gerakan fundamentalis telah memicu konflik dan memecah belah umat Islam yang pada waktu itu berada di dalam masyarakat plural yang toleran dan harmonis. Proses transformasi Islam berjalan lambat, tetapi konsisten di kawasan Asia, dari Islam yang sinkretis dan inklusif menjadi Islam yang puritan dan eksklusif. Di bawah pengaruh ide, norma, praktik, dan keuangan yang mengalir dari dunia Arab, ‘Islam padang pasir’ telah membuat terobosan melintasi

Samudra Hindia. Proses menghomogenkan dan me-resimen-kan ini, sebuah proses yang disebut ‘pengaraban Islam’, lebih menekankan pada ritual dan kode etik daripada substansi. Internasionalisasi Islam menarik Muslim Asia ke gurun pasir dan membawa gurun pasir kepada mereka (Ghosal, 2010). Globalisasi Islam Politik seperti itu dapat mengancam stabilitas di seluruh Asia dan dunia. Sayangnya, terlalu banyak pendukung fundamentalisme yang menjadikannya sebagai alat, bukan untuk mengilhami spiritualitas, tetapi untuk memperoleh keuntungan ekonomi ataupun politik.

Gerakan fundamentalis Islam memunculkan fenomena Islamfobia. Penelitian Syaza Farhana Mohamad Shukri (2019) menunjukkan Islamfobia di Indonesia merupakan isu yang pelik untuk dibahas. Beberapa menyebutnya sebagai sektarianisme, sedangkan lainnya hanya menganggapnya sebagai tindakan kekerasan atau kriminal. Namun, tidak dapat disangkal bahwa telah terjadi peningkatan retorika dan gerakan terkait berbagai praktik-praktik Islam di Indonesia. Kelompok diskusi terarah yang diadakan untuk penelitian ini menunjukkan bahwa selain Muslim memiliki prasangka Islamfobia terhadap Muslim lainnya, Islamfobia oleh non muslim juga sedang meningkat di Indonesia. Ini terjadi karena perubahan dari sekularisme menuju negara Islam yang dalam konteks Indonesia tidak dipahami sebagai penerapan Khilafah Negara Islam, tetapi lebih pada implementasi hukum Syariah di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut bisa memicu kekerasan antaragama seperti yang terjadi setelah aksi Islamfobia pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pada 2015. Seperti di negara lain, solusi Islamfobia adalah dengan menciptakan kesadaran dan toleransi dengan menjembatani kesenjangan keberagaman

agama di Indonesia melalui dialog antaragama.

Kondisi intoleransi bahkan terindikasi pada organisasi Islam pencetus gerakan Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama. Mietzner dan Muhtadi (2020) menyatakan NU sebagai organisasi Muslim terbesar di Indonesia telah diakui sebagai pembela toleransi dan pluralisme agama. Hal itu dihubungkan dengan bagaimana NU menggambarkan dirinya dan tindakannya, termasuk selama pemilihan presiden 2019, ketika NU menyatakan sejalan dengan presiden petahana, Joko Widodo, untuk menjauhkan kelompok-kelompok Islam dari kekuasaan. Mietzner dan Muhtadi menganalisis sikap pengikut NU terhadap toleransi dan pluralisme beragama, dan menemukan ketidaksesuaian yang signifikan antara persepsi diri pimpinan NU dengan pandangan aktual yang dianut oleh akar rumput NU. Berdasarkan data survei, penelitian menunjukkan bahwa pengikut NU pada umumnya tidak toleran terhadap agama minoritas. Mietzner dan Muhtadi berpendapat bahwa kondisi tersebut merupakan hasil dari prioritas lama NU ketika sejarah menunjukkan bahwa NU cukup fokus dalam memerangi organisasi Muslim saingan (yang dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingannya) daripada memajukan kampanye toleransi substantif yang dapat mengubah sikap politik agama para pengikutnya. Fenomena lain yang juga memicu intoleransi beragama adalah perdebatan mengenai mengucapkan selamat hari raya pada pemeluk agama lain.

Dalam analisisnya di berita NU daring, Mariyam S. (2020) melihat adanya kontroversi di kalangan ulama dan umat tentang tuturan Natal setiap menjelang perayaan Natal. Ini yang mendasari ketertarikan kajian terhadap media massa berbasis agama, salah satunya NU daring dalam pemberitaan terhadap tuturan

Natal. Analisis teks selama Desember 2018 yang memberitakan tentang tuturan Natal memperlihatkan bagaimana NU daring membingkai berita ucapan selamat Natal sebagai bagian dari toleransi, bukan bagian dari akidah sehingga persoalan tersebut lebih dilihat sebagai hubungan sosial. Oleh karena itu, apabila terdapat umat agama lain yang merayakan hari raya mereka, wajar saja jika mengucapkan selamat atas hari raya antar pemeluk agama tanpa melibatkan persoalan akidah dan keyakinan.

Kontroversi tuturan Natal juga telah menjadi pembahasan dalam penelitian Aspandi, (2018). Dalam artikel ilmiah ini, dipaparkan berbagai pandangan ulama terhadap sikap menghalalkan atau mengharamkan tuturan Natal. Habib Munzir Al Musawwa (Pemimpin Majelis Rasulullah SAW) menyatakan bahwa haram mutlak hukumnya jika ucapan selamat ditujukan untuk menyambut kemuliaan agama lain. Namun, jika untuk mempererat hubungan dengan mereka agar tertarik pada kebaikan dan keramahan agama Islam, maka hal ini khilaf.

Dalam video ceramah yang diunggah *YouTube Mustami'*, Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwa orang yang mengucapkan selamat Hari Natal berarti sudah mengakui tiga hal, yaitu mengakui Isa adalah anak Tuhan, mengakui Isa lahir pada 25 Desember, dan mengakui bahwa Isa mati disalib. Majelis Fatwa dan Riset Eropa juga berpendapat yang sama dengan fatwa Dr. Ahmad Zarqa' dalam hal kebolehan mengucapkan selamat Natal karena tidak adanya dalil langsung yang mengharamkannya. Kita boleh mengucapkan selamat Natal jika mereka bukan termasuk orang-orang yang memerangi kaum muslimin, khususnya dalam keadaan kaum muslimin sebagai kaum minoritas di sebuah negara. Ulama lain yang membolehkan antara lain Dr.

Abdus Sattar Fathullah Sa'id (Universitas AlAzhar), Dr. Muhammad Sayyid Dasuki (Universitas Qatar), dan Syeikh Muhammad Rasyid Ridho.

Studi Mujibur Rahman (2018) berargumen bahwa agama adalah entitas yang maha hadir, di mana saja dan kapan saja. Agama sebagai sistem nilai dan norma menjadi acuan umatnya dalam beribadah, berpikir, dan bertindak. Kehadiran agama di ruang publik kemudian dapat dipahami dari karakter atau sifat tersebut. Kehadiran agama tidak selalu berupa nilai dan doktrin atau pandangan hidup, tetapi juga hadir melalui bentuk material dan visual yang disebarkan melalui media dan semua instrumen yang ada. Agama, terutama setelah ditemukannya mesin cetak dan revolusi teknologi internet, menjadi fenomena baru yang direpresentasikan dalam berbagai bentuk. Komoditas religi dan visualisasi religi di era teknologi saat ini merupakan fenomena yang jamak. Visualisasi agama tidak bisa dilepaskan dari konteks komodifikasi agama. Agama dianggap sebagai bagian dari komoditas pasar yang dapat dijadikan alat untuk mendatangkan keuntungan. Visualisasi keagamaan lebih lanjut bukan sekadar komodifikasi, tetapi gaya baru pemeluk agama untuk menegaskan eksistensi agama. Hasil penelitian Rahman menunjukkan bahwa visual religi yang banyak muncul di ruang publik, disadari atau tidak, menjadi fenomena baru yang menarik untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian Genevieve Campbell (2014) mengkaji musik sebagai artefak budaya di Kepulauan Tiwi, Australia Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bagaimana materi lagu yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat Kepulauan Tiwi tidak hanya memiliki keterkaitan dengan musik, tetapi juga emosi, sosial politik, dan permasalahan etis. Interpretasi terhadap permasalahan hukum (hak cipta) juga menjadi isu

penting terkait dengan penerimaan rekaman dari lagu-lagu tradisional masyarakat Kepulauan Tiwi. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana musik menjadi artefak budaya yang penting yang dapat mengkomunikasikan nilai-nilai emosional suatu masyarakat. Selain itu, musik juga bisa menunjukkan bagaimana musik sebagai bagian dari identitas budaya mengalami proses negosiasi dialektis ketika harus berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Musik sebagai artefak budaya menjadi lokus yang menunjukkan negosiasi identitas budaya.

Berbagai penelitian sebelumnya, sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa secara ideal masyarakat yang majemuk seharusnya bisa menciptakan suatu harmoni yang dapat mewartakan semua perbedaan yang dimiliki. Ini karena interaksi berbagai kelompok yang berbeda adalah hal yang tidak terhindarkan. Namun dalam kenyataannya, banyak terjadi kegagalan proses negosiasi identitas antara berbagai pihak yang berbeda sehingga upaya komunikasi identitas oleh suatu kelompok dimaknai secara negatif melalui penggunaan stereotip dan prasangka tertentu yang bisa memicu konflik. Pemaknaan yang berbeda terhadap artefak budaya secara signifikan berpengaruh pada potensi munculnya konflik antarbudaya. Pada sisi yang lain, ada pula penggabungan budaya yang berbeda yang bisa memunculkan hibriditas budaya yang dapat diterima oleh kelompok-kelompok berbeda yang berpartisipasi di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah memahami pengalaman komunikasi dari organisasi kemasyarakatan berbasis agama pada artefak budaya yang berupa berbagai bentuk tuturan perayaan Natal. Dibandingkan penelitian yang sudah ada, penelitian ini menawarkan kebaruan yang belum tercakup pada studi sebelumnya,

yaitu memahami keberagaman kelompok Islam di Indonesia yang memiliki berbagai cara pandang atau perspektif terhadap pemaknaan toleransi dan dalam lingkup yang spesifik adalah pemaknaan terhadap artefak Natal.

## **METODE**

Studi ini menggunakan paradigma interpretif. Penelitian dalam paradigma interpretif digunakan untuk membantu menginterpretasikan dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara para pelaku mengkonstruksikan kehidupan mereka, dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan tersebut. Tindakan sosial tidak dapat diamati, tetapi lebih kepada pemaknaan subjektif terhadap tindakan sosial tersebut (Neuman, 2014).

Lokus penelitian ini adalah pemaknaan artefak budaya dan simbol-simbol keagamaan pada perayaan Natal. Metode yang digunakan adalah fenomenologi. Studi fenomenologi bertujuan untuk menerangkan, mengidentifikasi fenomena melalui bagaimana fenomena tersebut dipersepsikan oleh para pelaku dalam sebuah situasi. Secara operasional, studi fenomenologi ini berupaya untuk mengetahui pemaknaan tentang komunikasi identitas dari artefak budaya perayaan Natal pada berbagai organisasi sosial kemasyarakatan berbasis agama. Subjek penelitian ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan berbasis agama pada level regional (Jawa Tengah dan Jawa Timur), yaitu Muhammadiyah (Dr. KH Tafsir, M.Ag, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah), Nahdlatul Ulama (Dr. KH. Muhammad Adnan, MA, Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng 2003-2008), Majelis Mujahidin (Ustadz Farid

Ma'ruf, Amir Majelis Mujahidin Surakarta), Persatuan Islam, Ustadz Win Adi), dan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (Ustadz Asyaukanie Ong, Ketua PITI Surabaya). Para informan yang merupakan pimpinan organisasi tersebut diharapkan memberikan informasi tentang pengalaman mereka dalam memahami artefak budaya dan komunikasi identitas dalam masyarakat majemuk.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam secara langsung dengan subjek penelitian yang merupakan representasi dari organisasi sosial kemasyarakatan berbasis agama Islam di tingkat regional Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni Muhammadiyah, NU, PERSIS, Majelis Mujahiddin dan PITI. Organisasi-organisasi tersebut dipilih berdasarkan asumsi keberagaman perspektif terutama dalam melihat permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, peneliti mempertanyakan konsepsi, nilai-nilai, sikap dan kebijakan kelima organisasi terhadap prinsip toleransi dengan penganut agama yang berbeda, terhadap tuturan perayaan agama yang berbeda (tuturan Natal), dan artefak budaya (pemakaian atribut keagamaan yang berbeda dengan keyakinan pengguna dalam rangka perayaan agama tertentu).

Data dianalisis melalui tiga langkah, yaitu reduksi data, pengorganisasian data, dan interpretasi data (Sarantakos, 2013). Secara khusus, data dalam lokus penelitian ini (artefak tuturan perayaan Natal) dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah penelitian fenomenologi, yaitu permasalahan dan perumusan pertanyaan penelitian; data yang menghasilkan situasi: teks pengalaman kehidupan; dan analisis data: eksplikasi dan interpretasi (Moustakas, 1994).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian memunculkan beberapa tema yang berkaitan dengan pemaknaan tiga jenis tuturan, yaitu tuturan tentang toleransi, tuturan Natal, dan tuturan atribut keagamaan. Pada bagian ini, didiskusikan bagaimana pluralitas pemaknaan mengenai ketiga tuturan tersebut muncul dari berbagai perspektif organisasi berbasis agama Islam, yaitu Muhammadiyah, NU, PITI, Persis, dan Majelis Mujahidin.

### Pluralitas Pemaknaan Toleransi

Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, memberi batasan tentang toleransi. Toleransi dimungkinkan dalam konteks di luar masalah agama, tepatnya di luar masalah akidah dan ibadah, dan selama orang-orang non Muslim itu tidak memusuhi orang-orang muslim (Anggraeni dan Suhartinah, 2018). Ketua PITI Surabaya memaknai toleransi sebagai saling menghargai perbedaan, misalnya, perbedaan mengenai keyakinan. “Kalau hari Natal, mereka pergi ke gereja, jangan mengganggu, jangan diganggu. La ikraha fiddin, jangan ada paksaan”. Ketua PITI Surabaya, hal paling mendasar adalah tidak saling mengganggu ibadah dari masing-masing umat beragama. Dalil yang melandasi prinsip tersebut adalah *lakum dinukum waliyyadin*, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dalil tersebut sudah cukup untuk menjadi landasan sikap toleransi. Hal yang juga penting untuk dilakukan adalah tidak memaksa orang lain dan memberi contoh menjadi seorang muslim yang baik. Indikasi toleransi lain yang juga ditunjukkan oleh Islam, menurut Ketua PITI Surabaya lebi lanjutnya, adalah pengucapan salam. Umat Muslim seharusnya menebarkan salam bukan hanya ucapan “Assamualaikum”, tetapi juga berdasarkan hati dan perbuatan.

Salam itu sendiri artinya selamat, dan konsekuensi ucapan tersebut adalah kita sebagai umat Muslim harus membuat orang lain selamat.

Dasar dari sikap toleran terhadap penganut agama lain, diyakini NU sebagai mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Sikap yang diambil adalah membedakan antara keyakinan beragama dengan hubungan sosial dalam bermasyarakat. Informan dari NU menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi mencontohkan menghormati ibadah dan rumah ibadah penganut agama lain. Nabi menghormati ibadah kaum Yahudi atau Nasrani juga melarang merusak rumah ibadah dan mencaci maki ibadah orang lain. NU melihat tuturan Natal merupakan persoalan hubungan sosial, dan tidak akan merusak akidah orang Muslim. Jika diterapkan untuk perayaan ibadah agama Islam, misalnya Idul Adha, NU juga bersikap moderat dengan membolehkan daging kurban diberikan sebagai hadiah untuk kaum Nasrani yang tidak mampu. NU juga membolehkan jika penganut agama lain yang berbeda juga ikut dalam perayaan Idul Adha untuk menyumbangkan tenaga pelaksanaan atau menyumbangkan hewan kurban untuk dibagikan. Hanya saja, dalam hal hewan kurban, diperlakukan hanya sebagai hadiah, bukan sebagai kurban, seperti yang disampaikan oleh tokoh NU Jawa Tengah, Muhammad Adnan, sebagai berikut.

“Itu sama seperti saat Imlek, dibagikan beras, Klenteng Tay Kak Sie Semarang, misalnya, setiap tahun membagikan beras, kepada siapa pun, tidak pandang bulu. Hanya konteksnya saja yang berbeda. Jika dilakukan muslim menjadi zakat fitrah, kalau non muslim merupakan hadiah saja”.

Dalam konteks relasi sosial, M. Quraish Shihab (2003) menjelaskan dibolehkan bagi seorang muslim untuk mengucapkan salam yang diniatkan sebagai sapaan seperti selamat pagi atau selamat malam kepada non muslim selama untuk menjalin hubungan yang damai kepadanya, selama mereka tidak memerangi umat Islam. Ajaran ini didasarkan pada prinsip hidup berdampingan yang tertulis dalam firman Allah Swt. pada QS Al-Mumtahanah Ayat 8, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (Shihab, 2003).

Dalam pandangan informan dari Majelis Mujahidin, umat muslim memiliki pegangan yang kuat dalam memahami toleransi, yaitu ayat Alquran yang menegaskan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sebagaimana dinyatakan Ustadz Wandu, Wakil Ketua Majelis Mujahidin, berikut.

“Toleransi itu, misalnya, Anda mantenan (hajatan pernikahan), saya njagong (hadir dalam resepsi pernikahan). Anda mati, saya takziah (melayat). Namun, kalau menjaga gereja, mengucapkan salam yang macam-macam, itu bukan toleransi”.

Menurut Ustadz Wandu, bertoleransi adalah sejauh apa yang dituntun Allah dan Rasulnya. Kita tidak mau menyakiti orang lain dan orang lain jangan menyakiti kita. Oleh karena itu, menurutnya, tidak perlu mencampuri urusan orang lain dan orang lain jangan mencampuri urusan kita. Informan Majelis Mujahidin memberikan contoh kasus tentang perayaan Idul Adha. Ada warga non muslim yang ingin

membantu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Informan “menolak” keinginan warga non muslim tersebut karena berkaitan dengan kegiatan ibadah. Dalam pandangan informan, perbuatan ibadah melebihi batasan toleransi sehingga warga non muslim tidak perlu terlibat. Ketika pelaksanaan ibadah selesai, warga non muslim bisa menerima daging kurban yang dibagikan. Menurut informan, “Kita seharusnya perlu dan bisa membedakan antara persoalan agama (ibadah) dengan budaya, jangan dicampuradukkan antara agama dengan budaya.”

Toleransi, dalam pandangan informan dari Persatuan Islam, perlu ditempatkan dalam koridor syariat sebagaimana diperintahkan dalam Alquran ataupun dalam hadist. Menurut informan ini, janganlah meniru-niru kebiasaan orang-orang di luar Islam atau di luar tuntunan Allah dan Rasulnya. Ustadz Win Adi mengemukakan sebagai berikut.

“Kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan dalam Qur’an dan hadist, maka kita tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh penganut agama lain”,

Toleransi pada prinsipnya adalah saling menghormati, dan tidak harus saling memaksakan kehendak untuk mengikuti kebiasaan agama lain. Menurut Win Adi, saling menghormati, saling membantu, saling mendukung dalam urusan sosial kemasyarakatan, namun tidak dalam urusan akidah.

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, M. Tafsir, mengatakan bahwa selama tidak melanggar prinsip tauhid dan dimaknai sebagai profan (tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan), maka dipersilakan kepada warga Muhammadiyah untuk bersikap

sesuai penafsirannya. Selama tidak ada dalam teks Alquran atau perilaku yang dicontohkan Nabi Muhammad, maka segala sesuatu diberikan kebebasan penafsiran yang konsekuensinya adalah tidak ada kebenaran mutlak, kecuali syariah. Lebih lanjut, M. Tafsir mengatakan sebagai berikut.

“Mengucapkan selamat Natal seperti halnya khamar dan rokok tidak ada dalam teks kitab suci, sehingga selalu menjadi perdebatan boleh tidaknya”.

M. Tafsir juga menjelaskan semestinya ada relativitas beragama. Fiqih itu relatif, yang mutlak adalah syariatnya. Menurut-nya, terkadang, kita lupa bahwa ulama sendiri mengatakan *wallahu a'lam bishawab*, hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Masyarakat seringkali berkonflik bukan pada substansi, misalnya, memperdebatkan ketupat, bedug. Padahal, itu kreativitas budaya, kekhasan masyarakat Indonesia, karena kita bukan bangsa Arab. Keris sekali pun, menurut M. Tafsir, jika dimaknai sebagai budaya, tidak ada yang salah; yang salah apabila kita menyakralkannya karena prinsip Tauhid tadi. Dalam catatan pengalaman informan, donatur yang membantu kegiatan Muhammadiyah tidak harus Muslim karena muamalah bebas dengan siapa pun, sedangkan yang tidak boleh adalah ritual keagamaan.

Toleransi adalah aset publik yang penting dan tidak mempersyaratkan kelompok-kelompok budaya (agama) yang berbeda untuk memberikan pemaknaan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua organisasi Islam yang menjadi subjek dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka toleran terhadap agama lain. Mereka menyatakan menjalankan praktik-praktik toleransi tersebut sepanjang tidak melanggar batas-batas akidah dan ibadah diperbolehkan.

Namun, pemaknaan terhadap batasan tidak melanggar akidah dan ibadah tersebut ternyata berbeda-beda pada masing-masing organisasi. Dengan kata lain, meskipun mereka menyatakan bahwa organisasi mereka toleran, tetapi kalau dilihat dalam praktik yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi keagamaan terlihat bahwa mereka memaknai batasan toleransi secara beragam. Perbedaan tersebut terlihat jelas pada data yang secara lebih detail mengkaji pemaknaan masing-masing organisasi keagamaan terhadap praktik-praktik interpretasi artefak budaya yang berlangsung di masyarakat, seperti pemaknaan terhadap tuturan dan atribut Natal.

### **Pemaknaan terhadap Tuturan Natal**

Dalam pandangan Muhammadiyah, tuturan perayaan Natal tidak dijelaskan secara tersurat dalam ayat Alquran, sehingga boleh/tidaknya mengucapkan selamat Natal akan selalu menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai. Muhammadiyah memberikan “ruang kebebasan” kepada warganya untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan ucapan selamat Natal. Sebagaimana dinyatakan M. Tafsir,

“Kita hidup dalam satu bangsa, kalau kita mengatakan haram, maka akan berhadap-hadapan dengan agama lain. Negara Pancasila dibangun atas dasar komitmen, ada tidaknya Indonesia tergantung pada komitmen”.

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi kemasyarakatan berbasis agama ini menegaskan bahwa umat Muslim seyogyanya tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani karena pemberian ucapan tersebut bermakna pengakuan terhadap Yesus Kristus atau Nabi Isa sebagai Tuhan. Ustadz Win Adi

mengemukakan, “Bagi saudara-saudara kita orang Nasrani, Natal itu penghormatan atas kelahiran, nuwun sewu, Tuhan Yesus. Mereka menganggap Yesus itu Tuhan”. Prinsip akidah tauhid tidak membolehkan umat Muslim mengucapkan selamat Natal. Merujuk Alquran, Ustadz Win Adi mengemukakan, “Apakah kamu (Isa) menganggap dirimu sebagai tuhan selain Aku”. Oleh karena itu, dalam konteks keluarga beda agama, umat Muslim tidak perlu mengucapkan selamat Natal secara tersurat kepada kerabatnya. Sebaliknya, cukup bersalaman atau berjabat tangan saja. Hal yang sama berlaku untuk tetangga Nasrani yang merayakan Natal.

Majelis Mujahidin berpandangan bahwa mengucapkan selamat Natal sebenarnya bukan kebiasaan umat Muslim di Indonesia sejak dahulu. Umat Muslim “menghormati dan mempersilakan” umat Kristiani untuk merayakan Natal tanpa harus menyampaikannya secara verbal. Ucapan selamat Natal bukanlah wujud dari sikap toleran. Ini karena, menurut Majelis Mujahidin, toleransi itu sejauh apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Menurut Majelis Mujahidin, pandangan yang “memunculkan” perlunya mengucapkan selamat Natal belakangan ini atas nama moderasi beragama, justru membuat suasana yang dulunya bagus menjadi kebalikannya. Ini karena kemudian pandangan umat Muslim terpecah menjadi dua, setuju dan tidak setuju. Majelis Mujahidin menduga ada gerakan untuk “mengembangkan” semua agama. Visi dan misi Majelis Mujahidin adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia karena syariat Islam hanya 1% diperuntukkan umat Islam (rukun Islam), sisanya untuk semua.

Salah satu ulama rujukan sikap penolakan terhadap tuturan Natal adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), mantan Ketua MUI yang

memilih mundur setelah menolak mencabut fatwa MUI yang mengharamkan tuturan Natal. HAMKA mengharamkan muslim ikut serta dalam perayaan Natal sebab Natal diyakini kaum Nasrani sebagai hari kelahiran anak Tuhan mereka, dan itu masuk ke dalam wilayah akidah. Konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah jika ada kaum muslim yang menghadiri, maka dianggap telah melakukan perbuatan musyrik. HAMKA secara tegas menyatakan “Ingat dan katakan pada kawan yang tak hadir di sini, itulah akidah kita!” (Gunawan dan Shobron, 2015).

Selaras dengan HAMKA, menurut Ali Mustafa Yaqub (2008), kehadiran seorang Muslim dalam perayaan keagamaan non-Muslim, keikutsertaannya dalam panitia pelaksana perayaan, menyampaikan selamat kepada mereka, mengirimkan kartu selamat, dan menandatangani adalah termasuk kategori tolong-menolong dalam kebatilan, dosa, dan sesuatu yang diharamkan. Sikap ini, menurut Ali Mustafa Yaqub, sesuai dengan konteks ayat dalam QS Al-Furqan, bahwa salah satu tanda penghuni surga adalah tidak menghadiri perayaan hari-hari besar non-Muslim.

Nahdlatul Ulama (NU) secara kelembagaan membolehkan adanya tuturan selamat pada perayaan agama lain, misalnya, mengucapkan selamat Natal. Terma atau istilah yang digunakan lebih pada kata “boleh” bukan “harus” yang dalam *fiqih* diartikan wajib hukumnya sehingga jika tidak melakukan berarti berdosa. Lebih lanjut, Informan menyatakan sikap NU tentang tuturan Natal bahwa sifatnya boleh, dihukumi mubah, mengucapkan boleh, tidak mengucapkan juga tidak apa-apa. NU, dalam hal ini, bersikap lebih moderat dalam menyikapi tuturan Natal.

Dalam Tafsir al-Misbah (Vol. 8, h.184), M. Quraish Shihab mengemukakan membolehkan kaum muslim menghadiri perayaan hari raya non-muslim dan mengucapkan selamat Natal. Dasarnya, menurut Shihab, adalah Surat Maryam ayat 33, yang artinya, “Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”. Dalam *Lentera Alquran Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Shihab juga mengemukakan bahwa harus diakui ada ayat Alquran yang mengabadikan ucapan selamat Natal yang pernah diucapkan oleh Nabi Isa, tidak terlarang membacanya, dan tidak keliru pula mengucapkan “selamat” kepada siapa saja dengan catatan memahami dan menghayati catatan ini (Shihab, 2013).

Terkait dengan soal mengucapkan selamat Natal, informan dari PITI Surabaya menyatakan bahwa dalam PITI sendiri tidak pernah membahas mengenai mengucapkan Natal karena secara prinsip bebas saja. Artinya, boleh mengucapkan ataupun tidak mengucapkan. Dalam catatan pengalaman informan, memang ada yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal sama dengan meyakini. Namun sebenarnya, hal tersebut akan sulit diberlakukan kalau kita hidup dalam keluarga atau masyarakat yang beragam keyakinan. Pada masyarakat Tionghoa, kebanyakan merupakan keluarga yang beragam keyakinan sehingga saling mengucapkan selamat dan mengirimkan hadiah pada perayaan agama yang berbeda menjadi hal yang wajar dilakukan. Oleh karena itu, menurut PITI Surabaya, jika kita menolak ucapan atau hadiah Idul Fitri, misalnya, akan membuat ketidaknyamanan hubungan dalam keluarga. Sebaliknya, jika tidak memberikan ucapan pada perayaan agama dari kerabat, maka akan memunculkan ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Oleh sebab

itu, saling mengucapkan merupakan bagian dari budaya hari raya seperti *halalbihahal*.

### **Pemaknaan terhadap Atribut Keagamaan**

Tentang simbol budaya seperti baju dan topi Sinterklas, Muhammadiyah memahaminya sebagai wujud kreativitas budaya, seperti ketupat dan bedug untuk menyemarakkan perayaan Idul Fitri. Karenanya, Muhammadiyah menganggap tidak ada persoalan apabila baju dan topi Sinterklas dipakai atau digunakan oleh umat Muslim. M. Tafsir menjelaskan hal itu sebagai berikut.

“Perayaan dan artefak budaya itu bukan agama, tetapi kreativitas beragama. Kita ini tinggal di Indonesia, bukan Arab Saudi. Sinterklas, bedug, ketupat itu dilakukan umat beragama untuk menyemarakkan hari raya mereka. Jangan kemudian dihapus. Orang bisa diislamkan, jangan diarakkan. Jangan berpatokan pada permukaan, model baju, misalnya, karena yang diatur adalah menutup aurat. Bagaimana modelnya bergantung pada budaya masing-masing. Itu namanya jihad kebudayaan”.

Dalam pemahaman informan Majelis Mujahidin dan Persatuan Islam (PERSIS), artefak budaya, baju dan topi Sinterklas, tidak boleh dipakai oleh umat Muslim. Dalam pandangan organisasi Persatuan Islam, saling menghormati, saling tolong-menolong, saling mendukung, saling membantu ditekankan dalam urusan sosial yang umum, bukan dalam urusan akidah tauhid. Menurut kedua organisasi ini, seyogianya tidak ada “pemaksaan” dari pihak manapun (seperti memakai atribut-atribut budaya/keagamaan: topi/baju Sinterklas, peci,

hijab/kerudung bagi perempuan non muslim) yang bisa “merusak” akidah penganutnya. Kontroversi pemakaian baju dan topi Sinterklas di ruang publik tidak kunjung usai sehingga Majelis Mujahidin menganggap perlu dibangun sebuah dialog yang melibatkan berbagai pihak yang relevan agar tidak terjadi lagi “pemaksaan” kepada orang Muslim untuk menggunakan atribut-atribut tersebut.

Jika Majelis Mujahidin dan Persatuan Islam (PERSIS) ketat dalam melihat pemakaian atribut agama, maka NU tetap bersikap moderat. Informan dari NU menegaskan bahwa hal itu bukan soal peribadatan, tetapi lebih pada konteks bisnis dan pemasaran. Menurut informan ini, Quraish Shihab secara gamblang sudah menjelaskan dan apa yang dikemukakan Quraish Shihab adalah sikap NU sejak 1926, bahkan sudah dicetak menjadi Kompilasi Hukum Islam. Nilai-nilai berhubungan dan sikap kepada penganut agama lainnya ini diterapkan di sekolah-sekolah NU dalam mata pelajaran/mata kuliah ke-NU-an dan menjadi identitas kelompok.

Pandangan masing-masing organisasi kemasyarakatan berbasis agama, baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Mujahidin, Persatuan Islam, maupun Persatuan Islam Tionghoa Indonesia tentang artefak budaya dan tuturan perayaan keagamaan dapat dipilah ke dalam dua kutub yang berbeda. Muhammadiyah, NU, dan PITI berada dalam kutub “membolehkan” dan tidak mempersoalkan artefak budaya dan tuturan perayaan keagamaan. Sebaliknya, Persatuan Islam dan Majelis Mujahidin cenderung “menolak” penggunaan artefak budaya dan tuturan perayaan keagamaan karena bertentangan dengan prinsip akidah. Dalam konteks pemikiran teoretik negosiasi identitas, Muhammadiyah, NU, dan PITI cenderung bersedia mengelola atau menegosiasikan identitas mereka,

sedangkan Majelis Mujahidin dan Persatuan Islam cenderung untuk tetap mempertahankan identitasnya dengan “menolak” untuk menegosiasikannya. Perbedaan pandangan berbagai organisasi kemasyarakatan berbasis agama tentang artefak budaya dan tuturan perayaan keagamaan memang tidak bisa dihindari karena masing-masing pihak memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami realitas tersebut. Sama halnya ketika berbagai organisasi tersebut mempunyai metode atau cara yang berbeda dalam menetapkan awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Dalam masyarakat yang memperlihatkan ciri atau karakteristik multiagama seperti Indonesia, agama ditempatkan sebagai rujukan untuk menjalankan identifikasi. Masyarakat semacam ini tidak sekadar memiliki keragaman budaya, tetapi juga keyakinan yang beragam. Agama, dalam konteks demikian, bukan sekadar menjadi sistem keyakinan yang bercorak netral. Namun, lebih dari itu, agama merupakan rujukan kebenaran dalam menjalankan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan agama sebagai sistem norma yang diposisikan sebagai sarana untuk memberikan pembedaan di antara berbagai kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Agama mampu menciptakan kekuatan yang memberi kesamaan (*sameness*) bagi kelompok tertentu, serta serentak dengan itu agama pun mampu menggulirkan perbedaan (*difference*) bagi kelompok yang lain (Andersen & Taylor, 2011).

## KESIMPULAN

Identitas bukan sesuatu yang sifat tetap. Sebaliknya, identitas dikonstruksikan secara sosial, kompleks, dinamis dan juga abstrak. Dalam perspektif interpretif, identitas dinegosiasikan, diciptakan bersama, dikuatkan, dan dipertentangkan melalui

komunikasi dengan pihak lain. Identitas muncul ketika terjadi pertukaran pesan. Identitas berbicara tentang siapa kita, siapa orang lain, bagaimana kita memahami diri kita, dan bagaimana kita mengkomunikasikan identitas kita kepada orang lain.

Dalam konteks pemaknaan terhadap artefak budaya dan tuturan perayaan keagamaan, organisasi kemasyarakatan berbasis agama memiliki pandangan yang tidak sama yang bisa dikelompokkan ke dalam kutub yang berbeda. Kutub pertama adalah Muhammadiyah, NU, dan PITI yang tidak mempersoalkan keberadaan artefak budaya dan tuturan perayaan keagamaan sebagai suatu realitas, sedangkan Majelis Mujahidin dan Persatuan Islam cenderung memberikan “penolakan” terhadap realitas tersebut. Pandangan kelima organisasi kemasyarakatan berba-

sis agama yang “membolehkan” dan “menolak” artefak budaya tersebut merupakan ekspresi toleransi, hanya saja Majelis Mujahidin dan Persatuan Islam lebih menekankan toleransi dalam konteks saling membantu dalam urusan umum.

Penelitian ini membawa implikasi pemahaman bahwa toleransi memiliki banyak sudut pandang yang berpotensi untuk memunculkan konflik. Namun, masih ada benang merah yang dapat ditarik dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yakni ketiadaan keinginan untuk mencampuri prinsip yang dipercaya oleh pihak yang lain. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pengambil kebijakan perlu lebih menekankan pada benang merah yang menyatukan pemaknaan mengenai toleransi, bukan pada pandangan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, Margaret L. & Howard F. Taylor (2011). *Sociology: The Essentials, 6<sup>th</sup> Edition*, Belmont, California: Wadsworth.
- Anggraeni, D., & Suhartinah, S. (2018). *Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub. Jurnal Studi Al-Qur'an*, 14(1), 59-77
- Aspandi, A. (2018). *Halal dan Haram Natal. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(3), 225-234.
- Badan Pusat Statistik (2015). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia>.
- Campbell, G. (2014). *Song as Artefact: the Reclaiming of Song Recordings Empowering Indigenous Stakeholders and the Recordings Themselves*, dalam A. harris (ed.),
- Circulating Cultures: Exchanges of Australian Indigenous Music, Dance and Media (p. 101-127), Australian National University.
- Faidi, A. (2020). *Pendidikan Toleransi Terhadap Remaja Muslim dan Kristen di Salatiga (Studi Terhadap Perayaan Halal Bihalal dan Natal Bersama di Desa Pengilon Mangunsari Sidomukti Kota Salatiga)*. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 12(2), 134-150.
- Ghoshal, B. (2010). Arabization: The Changing Face of Islam in Asia. *India Quarterly*, 66 (1), 69-89. <http://www.jstor.org/stable/45072987>
- Hamka. 1983. *Tafsir Al-Azhar Juz III*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

- Kato, H. (2021). The Islam Nusantara Movement in Indonesia. In M.A. Upal & C.M. Cusack (Eds.), *Handbook of Islamic Sects and Movements* (pp. 110-128). Brill. <http://www.jstor/stable/10.1163/j.ctv1v7zbv8.10>
- Gunawan, H., Hidayat, S., & Shobron, S. (2015). *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholish Madjid* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G (2017). *Theories of Human Communication*, (11<sup>th</sup> ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Mariyam, S. (2020). *Konstruksi Berita Ucapan Selamat Natal di NU Online*. ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 11(1), 59-70.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*, Sage Publication.
- Mujibur Rahman (2018). *Visualisasi Agama di Ruang Publik: Komodifikasi, Reproduksi Simbol dan Maknanya*, HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman, 4(1), 91-106, <https://doi.org/10.36835/humanistika.v4i1.32>
- Mursyid, S. (2018). *Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam*. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 1(2).
- Neuman, W. Lawrence (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition*. Essex: Pearson Education Limited.
- Prima, D. (2015). *Penafsiran ucapan selamat natal dan prinsip-prinsip toleransi beragama dalam tafsir al-misbah*. Journal Analytica Islamica, 4(1), 1-26.
- Saenong, F.F. (2021). Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam. In M.A. Upal & C.M. Cusack (Eds.), *Handbook of Islamic Sects and Movements* (pp. 129-150). Brill. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv1v7zbv8.11>
- Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R. (2010). *Communication Between Cultures*. Boston: Cengage Learning.
- Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., Roy, C. A. (2017). *Communication Between Cultures*, (9<sup>th</sup> ed.). Boston: Cengage Learning.
- Sarantakos, S. (2013). *Social Research* (4<sup>th</sup> ed.), Palgrave Macmillan.
- Shihab, M. Quraish (2003). *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish (2013). *Lentera Al-Quran Kisah dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan.
- Shukri, S.F.M. (2019). The Perception of Indonesian Youths toward Islamophobia: An Exploratory Study. *Islamophobia Studies Journal*, 5(1), 61-75. <https://doi.org/10.13169/islastudj.5.1.0061>
- Yaqub, Ali Mustafa (2008). *Kerukunan Umat Perspektif Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus.